



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARANGJORO
dan
KEPALA DESA PARANGJORO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro.
pada tanggal 25 Maret 2019
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro.
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR

LEMBARAN DESA PARANGJORO TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Parangjoro ini merupakan rencana strategis Desa Parangjoro untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasi, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Parangjoro ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45).

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Parangjoro telah ada semenjak adanya Pemerintahan Kraton Kasunan Surakarta dan bahkan telah ada sebelumnya :

A. Zaman Kademangan sebelum Tahun 1900

1. Pejabat Desa / Perangkat Desa / Pamong Desa yang ada :

- Demang : Diporejo di Sudimoro
- Lurah : Dijookreto di Sudimoro
- Bekel :
 1. Poncorejo di Sudimoro
 2. Kartorejo di Sudimoro
 3. Setro Dikromo di Parangjoro
 4. Kariyo Dikromo di Sudimoro

2. Wilayah : 1. Dukuh Parangjoro, Menakan, Ngadijoyo, Banjarmlati, Sonorejo, Gedhong.

2. Dukuh Menur, Jengkangan, Curidan.

3. Dukuh Sudimoro, Jebagan, Galangeng, Singkil

3. Pejabat Desa diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kraton Surakarta

4. Tahun 1880 didirikan Pemerintahan Parangjoro oleh PB IX Raja Surakarta 12 Oktober 1880 (Parangjoro: 10, Pesanggrahan: 12)

5. Kantor, sekarang Rumah Bapak Yoso Suparto di Singkil

B. Zaman Komplet (Th. 1920 – 1926)

1. Pejabat Desa / Pamong Desa

- Lurah : Soko Dikromo – Singkil (asli singkil)
- Bekel :
 1. Karyo Dikromo – Sudimoro
 2. Mangun Rejo – Singkil
 3. Wiro Sarjono – Singkil
 4. B Wiro Sanjoyo – Singkil
 5. Merto Dongso – Singkil
 6. Singo Dimejo – Singkil
 7. B Singo Dimejo – Singkil
 8. Sonto Ijoyo – Singkil
 9. Ranu Semito – Curidan
 10. Setro Dikromo – Parangjoro

2. Wilayah : 1. Dukuh Parangjoro, Menakan, Ngadijoyo, Banjarmlati,

2. Dukuh Menur, Jengkangan, Curidan

3. Dukuh Sudimoro, Jebagan, Galangeng, Singkil

3. Pituas / bengkok : No. 1 s/d 9 Selatan Dukuh Jebagan
No. 10 Timur Dukuh Parangjoro

4. Lurah ditetapkan dari Kraton dan bekel diusulkan oleh Lurah Desa

C. Zaman setelah Komplet (Th. 1926 – 1938)

1. Wilayah : 1. Dukuh Parangjoro, Menakan, Ngadijoyo, Banjarmlati,
2. Dukuh Menur, Jengkangan, Curidan
3. Dukuh Sudimoro, Jebagan, Galangeng, Singkil

2. Pamong Pangreh Desa

- Lurah Desa : R G Cincing Dono Panukma asli Solotiga, Ibu Mangkuyudan Solo
- Carik Desa : Jati bertempat tinggal Rumah Gendun Supardi di Jengkangan
- Kebayan Desa : 1. Tirta Dimejo – Parangjoro, Menakan, Hadijoyo, Banjarmlati
2. Suto Taruno – Menur, Jengkangan, Curidan
3. Suto Dikromo – Singkil, Jebagan, Galangeng, Sudimoro

3. Pembantu Pertanian : Mulyadi

4. Tahun 1938 – 1939 Lurah diganti RG Jogotenoyo, kantor rumah Parmo Harjono sekarang

D. Zaman menjelang Jepang s/d Perang Kemerdekaan

1. Wilayah : 1. Dukuh Parangjoro, Menakan, Ngadijoyo, Banjarmlati,
2. Dukuh Menur, Jengkangan, Curidan,
3. Dukuh Sudimoro, Jebagan, Galangeng, Singkil

2. Pamong Desa

- Lurah Desa : Wiro Atmojo – Parangjoro Th. 1940
- Carik Desa : Suro Surono - Parangjoro Th. 1943
- Kebayan Desa : 1. To Pawiro – Parangjoro
2. Suto Pawiro – Menur
3. Suto Dikromo – Singkil, Jebagan, Galangeng, Sudimoro
- Pembantu Pertanian: Tisno Wardoyo

3. Kantor Desa : Halaman Pesanggrahan Parangjoro.

4. Terjadi tiga Pergolakan Besar :

- Th. 1947 Pengaruh PKI, Musa telah merombak sampai di Parangjoro.
- Th. 1948 – 1949 sebagai Markas TRI Angkatan Darat yang mempertahankan Kemerdekaan RI.
- Tahun 1950 MMC menempati Pesanggrahan Parangjoro sebagai sarangnya.
- Tahun 1951 Geger akibat terbunuhnya Perwira Polisi Sukoharjo di Parangjoro.
- Tahun 1951 timbul wilayah baru akibat pengaplingan liar terhadap Tahan Kas Desa yaitu Badran Parangjoro, Badran Menur, Badran Singkil.

E. Masa Tahun 1951

- a. September 1953 Pilihan Kepala Desa dan dimenangkan Bp Suro Suro Parangjoro.
- b. September 1954 Pilihan Carik Desa Parangjoro dan dimenangkan Bp Dirjo Wiyono Singkil.
- c. Tahun 1955 kursi Lurah telah terisi maka Bp Dirjo Wiyono Singkil, maka Wiro Atmojo diangkat PNS di Kecamatan Grogol hingga memperoleh Hak Pensiun.

1. Komposisi Pamong Desa adalah :

- 1) Lurah Desa : Suro Suro (1953 s/d
- 2) Carik Desa : Dirjo Wiyono (1954 s/d
- 3) Kebayan I : Reso Dikromo
- 4) Kebayan II : Suto Taruno
- 5) Kebayan III : Suto Dikromo
- 6) Ulu-ulu : Djo Pawiro
- 7) Pamong Tani : Reso Suwito
- 8) Modin : Im Mukayat

Kantor Desa di Rumah Bp Suro Suro

F. Masa Pasca Pemilu Th. 1955 s/d Pasca G30/ S PKI

1. Pamong Desa terdiri dari :

- 1) Lurah Desa : Suro Suro
- 2) Carik Desa : Dirjo Wiyono s/d Th 1965; Hadi Suharto (Th. 1966 s/d Th. 2001)
- 3) Kebayan I : Parto Wiyoto s/d Th. 1965; Priyo Harjono (Th. 1968 s/d Th. 2001)
- 4) Kebayan II : Reso Suwito (..... s/d Th.....; Tumino TB (Th. 1974 s/d Th. 2007)
- 5) Kebayan III : Muh Dahlan s/d Th.; Darto Taruno (Th 1968 s/d Th. 2001)
- 6) Ulu-ulu : Jo Pawiro
- 7) Pamong Tani : Sutomo s/d Th. 1964;

Suwandi, HS (Th. 1972 s/d Th. 2009)

8) Modin : M Abdul Basir s/d Th. 1964;

M. Muhcdi (Th. 1968 s/d Th. 2004)

G.Masa berlakunya Perda I Tahun 1975 dan UU No: 5 Tahun 1979

1. Pamong Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Djono, BA – Parangjoro (1974–1987).
- 2) Sekretaris Desa : Hadi Suharto – Singkil,
P Sek Dsa Sandimin – Parangjoro
- 3) Bayan I : Priyo Harjono
- 4) Kebayan II : Tumino TB
- 5) Kebayan III : Darto Taruno
- 6) Ku Pemerintahan : Sugiyono, HS
- 7) Ku Pembangunan : Suwandi, HS
- 8) Ku Keuangan : M Said
- 9) Ku Kesra / modin : M Muhcdi
- 10) Ku Umum : Padmo Suharjo
- 11) Ulu ulu : Djo Pawiro (Th. s/d Th. 1976)
- 12) Penjaga Kantor : Sumardi
- 13) SKD : Pardimo

2. Tanah Pertanian Penduduk dibeli untuk Kas Desa ± 100 Ha Th. 1985 (Desa Telukan, Desa Pondok, Desa Langenharjo, Desa Gedangan, Desa Grogol, Desa Manang, Desa Banaran, Desa Kertonatan)

3. Ketua LKMD : Husni, Pringgo Sumarto

4. Ketua PKK : Ny Djono

5. Th. 1979 Pensertifikatan Tanah Badran

6. Th. 1979 Pensertifikatan Lumbung Silayur

7. Th. 1980 In Pesanggrahan

8. Th. 1982 Prona

9. Wilayah terdiri dari 10 Dusun, 20. RT, 9 RW

10. Th. 1976 Pemindahan Kantor Desa ke Singkil

11. Kepala Desa antar waktu Bp Hadi Suharto

12. Bangkitnya ekonomi Pedesaan dari Pertanian – Home Industri

13. Mengatur Kelompok Tani Sido Mulyo Juara Nasional , sebagai Desa percontohan UU No : 5 Tahun 1979, Pendapatan tertinggi Dharmotirta pada masa Ketua Bp Sayuti HW.

H. Masa berlakunya Perda No : I Th 1982 dan UU No : 5 Tahun 1979

1. Pamong Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Triman S Raharjo, ST, (1988–1997)
- 2) Sekretaris Desa : Hadi Suharto (1966 – 2001)
- 3) Bayan I : Priyo Harjono (1968 – 2001)

- 4) Kebayan II : Tumino TB (1974 – 2007)
 - 5) Kebayan III : Darto Taruno (1968 – 2001)
 - 6) Ku Pemerintahan : Sugiyono, HS (1976 – 2012)
 - 7) Ku Pembangunan : Suwandi, HS (1972 – 2009)
 - 8) Ku Keuangan : M Said (1982 – sekarang)
 - 9) Ku Kesra / modin : M Muhcdi (1968 – 2004)
 - 10) Ku Umum : Padmo Suharjo (1982 – 2005)
 - 11) Penjaga Kantor : Sumardi (1987 – sekarang)
 - 12) SKD : Ninik Ernawati (1984 – sekarang)
2. Wilayah terdiri dari RT, ...RW, ... Dukuh
 3. Ketua LKMD : Hadi Wiyono, Djono BA
 4. Ketua PKK : Ny Triman S Raharjo
 5. Penetapan Desa : tertinggal
 6. Kepala Desa Antar waktu Bp Hadi Suharto
 7. Ketua Dharmatirta : Hadi Wiyono
 8. Penyelenggaraan Pemilu Th. 1992 dan 1997
- I. Masa Berlakunya Perda ...
1. Pamong Desa terdiri dari :
 - 1) Lurah Desa : Sumaryono, SH – Jengkangan
(Th. 1998 – Th. 2006).
 - 2) Sekretaris Desa : Hadi Suharto
(Th. 1966 s/d Th. 2001);
Joko Waluyo
(Th. 2002 s/d Th. 2017).
 - 3) Kadus I : Priyo Harjono
(Th. 1968 s/d Th. 2001);
Ngadiman IR
(Th. 2002 s/d sekarang).
 - 4) Kadus II : Tumino TB
(Th. 1974 s/d Th. 2007);
Sutardi
(Th. 2009 s/d sekarang).
 - 5) Kadus III : Darto Taruno
(Th. 1968 s/d Th. 2001);
Suyamto
(Th. 2002 s/d sekarang).
 - 6) Ku Pemerintahan : Sugiyono, HS
(Th. 1976 s/d Th. 2017).
 - 7) Ku Pembangunan : Suwandi, HS

- (Th. 1972 s/d Th. 2009).
- 8) Ku Keuangan : M Said
(Th. 1982 s/d sekarang).
- 9) Ku Kesra / modin : M Muhcdi
(Th. 1968 s/d 2004);
Dalimin
(Th. 2005 s/d 2017).
- 10) Ku Umum : Padmo Suharjo
(Th. 1982 s/d Th. 2005);
Ngadiman R
(Th. 2006 s/d sekarang).
- 11) Penjaga Kantor : Sumardi
(Th. 1987 s/d sekarang).
- 12) SKD : Ninik Ernawati
(Th. 1984 s/d sekarang)
2. Wilayah terdiri dari 3 Kebayana, ... RT, ... RW, ... Dukuh
3. Ketua LKMD : Drs. Sri Lahir; Djono, BA;
Suparman, Bsc
4. Ketua PKK : Ny. Sumarni Sumaryono
5. Pemekaran Industri : Pabrik Furniture, rencana Perum
KPR
6. Pemekaran wilayah RT dan RW
7. Kepala Desa antar Waktu : Drs Pardi
8. Ketua Dharmatirta : Wiyono
9. Penyelenggaraan Pemilu Th.
10. Anggota Baperdes
- 1) Suwedji Widyo M
 - 2) Drs Syahroni
 - 3) Djona BA
 - 4) Drs Pardi
 - 5) Sumarsoni, SH
 - 6) Petrus Andi SH
 - 7) Supardi SPd
 - 8) Suratman SSi
 - 9) Wartono SPd
 - 10) Harsono Amd
 - 11) K Joko Priyanto ST
 - 12) Sumadi Sag
 - 13) Maryono

J. Masa berlakunya Perda Th.

1. Pamong Desa terdiri dari :

- 1) Lurah Desa : Harjono
(Th. 2006 s/d Th. 2012).
- 2) Sekretaris Desa : Joko Waluyo
(Th. 2002 s/d Th. 2017).
- 3) Kadus I : Ngadiman IR
(Th. 2002 s/d sekarang).
- 4) Kadus II : Tumino TB
(Th. 1966 s/d Th. 2007);
Sutardi
(2009 s/d sekarang).
- 5) Kadus III : Suyamto, SE
(Th. 2002 s/d sekarang).
- 6) Ku Pemerintahan : Sugiyono, HS
(Th. 1976 s/d Th. 2012).
- 7) Ku Pembangunan: Suwandi, HS
(Th. 1972 s/d Th. 2009);
Ariyanto, SE
(Th. 2009 s/d sekarang).
- 8) Ku Keuangan : M Said
(Th. 1982 s/d sekarang).
- 9) Ku Kesra / modin: Dalimin
(Th. 2005 s/d Th. 2017).
- 10) Ku Umum : Ngadiman R
(Th. 2006 s/d sekarang).
- 11) Penjaga Kantor : Sumardi
(Th.1987 s/d sekarang).
- 12) SKD : Ninik Ernawati
(Th.1984 s/d sekarang).

2. Wilayah terdiri dari 3 Kebayana, ... RT, ... RW, ... Dukuh.

3. Ketua LPM : Suparman, Bsc
4. Ketua PKK : Ny. Mariyem Harjono
5. Pemekaran Industri : Pabrik Furniture, rencana Perum
KPR
6. Pemekaran wilayah RT dan RW
7. Ketua Dharmatirta : Wiyono
8. Komandan Linmas : Suroso
9. Penyelenggaraan Pemilu Th.
10. Anggota BPD
 - 1) Bambang Sutrasno, SE

- 2) Djono BA
- 3) Riyadi
- 4) Rukimin Drs
- 5) Madiyono
- 6) Sumaryadi, SE
- 7) Prawoto
- 8) Sutardi
- 9) H Sri Hartono
- 10) Suyadi
- 11) Sutarno, Ssos Msi

11. Pemekaran wilayah Rt, ... Rw, ... Dukuh

12. Berkembangnya kelompok Kemasyarakatan

13. Hadirnya Industri besar

14. Hadirnya Pengembang Perumahan

15. Penyelenggaraan Pilgub Tahun : 2008; Pemilu : Tahun 2009

J. Masa berlakunya Perda Th 2006

1. Pamong Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Senen Poerwo Miharjo
(Th. 2012 s/d Th. 2018)
- 2) Sekretaris Desa : Joko Waluyo
(Th. 2002 s/d Th. 2017)
- 3) Kadus I : Ngadiman IR
(Th. 2002 s/d sekarang)
- 4) Kadus II : Sutardi
(Th. 2009 s/d sekarang)
- 5) Kadus III : Suyamto, SE
(Th. 2002 s/d sekarang)
- 6) Ku Pemerintahan : Sugiyono, HS
(Th. 1976 s/d Th. 2012)
- 7) Ku Pembangunan : Ariyanto, SE
(Th. 2009 s/d sekarang)
- 8) Ku Keuangan : M Said
(Th. 1982 s/d sekarang)
- 9) Ku Kesra / modin : Dalimin
(Th. 2005 s/d Th. 2017)
- 10) Ku Umum : Ngadiman R
(Th. 2006 s/d sekarang)
- 11) Penjaga Kantor : Sumardi
(Th. 1987 s/d sekarang)
- 12) SKD : Ninik Ernawati

(Th. 1984 s/d sekarang)

2. Wilayah terdiri dari 3 Kebayanan, 31 RT, 11 RW, ... Dukuh
3. Ketua LPM : Heri Samto, SH
4. Ketua PKK : Ny. Mariyem Senen PM
5. Pemekaran Industri : Pabrik Furniture, rencana Perum KPR
6. Pemekaran wilayah RT dan RW
7. Ketua Dharmatirta : Wiyono
8. Komandan Linmas : Mardiyanto
9. Penyelenggaraan Pemilu Th. 2012 Pilgub; Th. 2014 Pileg
10. Anggota BPD
 - 1) Sutarno, Ssos Msi
 - 2) Ir K Joko Priyanto, ST
 - 3) Riyadi
 - 4) Madiyono
 - 5) Harno
 - 6) Supardi Spd
 - 7) Wijiyanto
 - 8) Suwedji Widyo Murdoko (Bambang Sutrasno dan Sumaryadi mundur dari BPD)
 - 9) Widodo
 - 10) Suyadi
 - 11) Maryanto
11. Pemekaran wilayah Rt, ... Rw, ... Dukuh
12. Berkembangnya kelompok Kemasyarakatan
13. Hadirnya Industri besar.
14. Hadirnya Pengembang Perumahan

K. Masa berlakunya Perda Th 2006

1. Perangkat Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Hardiman ,SH
(Th. 2018 -)
- 2) Sekretaris Desa : Pajar
(Th. 2017 s/d)
- 3) Kadus I : Ngadiman IR
(Th. 2002 s/d)
- 4) Kadus II : Sutardi KS
(Th. 2009 s/d)
- 5) Kadus III : Suyamto, SE
(Th. 2002 s/d)

- 6) Kasi Pemerintahan: Dalimin
(Th. 2017 s/d)
 - 7) Kasi Kesra : Riyadi,Amd
(Th. 2017 s/d)
 - 8) Ku Perencanaan : Ariyanto, SE
(Th. 2009 s/d)
 - 9) Ku Keuangan : M Said
(Th. 1982 s/d)
 - 10)Ku TU dan Umum: Ngadiman R
(Th. 2006 s/d)
 - 11)Penjaga Kantor : Sumardi
(Th. 1987 s/d)
 - 12)SKD : Ninik Ernawati
(Th. 1984 s/d Th. 2019);
2. Wilayah terdiri dari 3 Kebayanan, 31 RT, 11 RW, ... Dukuh
 3. Ketua LPM : Purwo Sudiro
 4. Ketua PKK : Ny. Maryani
 9. Penyelenggaraan Pemilu Th. 2019
 10. Anggota BPD
 - 1) Sutarno, Ssos Msi
 - 2) Bambang Sutarsno SE MM
 - 3) Ita Dwi Astuti
 - 4) Drs.Sunarno
 - 5) Suparman
 - 6) Rubiman
 - 7) Bandowi
 - 8) Sigit Kurnianto SS
 - 9) Joko Waluyo
 - 11.Hadirnya Industri besar.

L. Perkembangan pemekaran Dukuh, lembaga Desa Rt dan Rw

1. Lembaga Desa terbawah yang sekarang ini disebut RT maupun RW pada dasarnya sejak jaman Jepang telah ada yang disebut Go Min Cou → Gomincok dibentuk Pemerintah Jepang dipergunakan untuk memperlancar sistim penguasaan wilayah.
2. Sedangkan Dukuh maupun Dusun dibentuk sebelumnya oleh para Penduduk sebagai satu ikatan kekeluargaan adapun perkembangannya sbb :

Sampai dengan masa Kebekelan Parangjoro terdiri dari :

 - a. Sudimoro
 - b. Jebagan

- c. Tegal Langgeng
- d. Jetis
- e. Singkl Jati Teken
- f. Menur
- g. Jengkangan
- h. Curidan
- i. Parangjoro
- j. Menakan
- k. Tempel
- l. Ngadijoyo
- m. Banjarmati

3. Setelah ada pemetaan oleh Pemerintah RI Tahun 1950 menjadi :

- 1. Sudimoro
- 2. Jebagan
- 3. Singkil
- 4. Menur
- 5. Jengkangan
- 6. Curidan
- 7. Parangjoro
- 8. Ngadijoyo
- 9. Banjarmati

4. Perkembangan karena pengaplingan liar Th 1950 bertambah 3 Dukuh yaitu:

- a. Badran Parangjoro
- b. Badran Menur
- c. Badran Singkil

5. Setelah adanya Penataan RT menurut UU No. 5 Tahun 1979 tersebut No: 4 bergabung menjadi :

- a. Parangjoro,
- b. Menur, dan
- c. Singkil

6. Dengan berkembangnya Pemukiman Baru diusulkan Tahun ini bertambah 2 Dukuh yaitu :

- a. Perum Puri Permata,
- b. Perum Griya Permata Asri.

7. Batas batas Desa Parangjoro

- a. Padusunan/Padukuhan yang tergolong menjadi Desa Parangjoro lihat Peta terlampir
- b. Batas wilayah semula berbentuk Batas alam namaum karena perkembangan Pembangunan alur Bengawan Solo sedikit mengalami perubahan :

- Awal

Barat Daya, Barat, Utara, berbatasan dengan bengawan Solo yang bersebelahan dengan

Barat Daya	: Desa Sidowarno Wonosari Klaten
Barat	: Desa Ngrombo Baki Desa Pondok Grogol
Utara	: Desa Pondok Grogol
Timur Laut	: Desa Telukan
Timur	: Kelurahan Bulakrejo Sukoharjo
Selatan	: Kelurahan Sonorejo Sukoharjo

- Sekarang

Barat Daya, Barat dan Utara mengalami perubahan bukan batas alam tetapi langsung dengan Desa yang dimaksud karena Bengawan Solo lama yang ter Urug

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Parangjoro, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Telukan dan Desa Pondok
Sebelah selatan	: Desa Sonorejo, Desa Sidowarno
Sebelah Barat	: Desa Pondok, Sungai Bengawan Solo
Sebelah Timur	: Kelurahan Bulakrejo

b) Luas Wilayah Desa

1. Tanah Sawah	: 291,2 ha
2. Tanah Kering	: 149,09 ha
3. Fasilitas Umum	: <u>59,62 ha</u>
	499,91 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 4,2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 8 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 8 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 16 Menit

d) Jumlah penduduk :

Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember 2018

1. Jumlah Penduduk laki laki	: 2.509 orang
2. Jumlah Penduduk perempuan	: 2.441 orang
3. Jumlah Penduduk Keseluruhan	: 4.950 orang
4. Jumlah KK	: 1.564 KK

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1) Tidak/Belum Sekolah	:	970	orang
2) Belum Tamat SD/Sederajat	:	583	orang
3) Tamat SD / sederajat	:	1.079	orang
4) Tamat SLTP / sederajat	:	830	orang
5) Tamat SLTA / sederajat	:	1.357	orang
6) Tamat D1/D2	:	13	orang
7) Tamat D 3	:	118	orang
8) Tamat S 1	:	172	orang
9) Tamat S 2	:	9	orang
10) Tamat S3	:	1	orang

a). Lembaga Pendidikan

1. Gedung PAUD	:	2 buah/ Lokasi di Dk. Menur, Dk. Parangjoro.
2. Gedung TK	:	4 buah/ Lokasi di Dk. Sudimoro, Dk. Singkil, Dk. Menur dan Dk. Parangjoro.
2. SD/MI	:	2 Negeri 2 Swasta Lokasi di Dk. Sudimoro, Dk. Singkil, Dk. Menur dan Dk. Parangjoro.
3. SLTP/MTs	:	1 Negeri, 1 Swasta Lokasi di Dk. Menur, Dk. Sudimoro.
4. SLTA/MA	:	1 Negeri Lokasi Di Dk. Menur
5. Lain-lain	:	Polindes 1 buah/ Lokasi di Dk. Menur.

b). Kesehatan

1. Kematian Bayi

a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	:	73 orang
b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	:	 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	:	73 Orang
b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	:	 Orang

3. Cakupan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Polio 3	:	77 orang
b. Cakupan Imunisasi DPT-1	:	78 orang
c. Cakupan Imunisasi Cacar	:	78 orang

4. Gizi Balita

a. Jumlah Balita	:	375 orang
b. Balita gizi buruk	:	2 orang

- c. Balita gizi baik : 362 orang
- d. Balita gizi kurang : 11 orang

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna sumur galian : KK
- b. Pengguna air PAM : 1.200 KK
- c. Pengguna Sumur Pompa : 120 KK
- d. Pengguna sumur hidran umum : ... KK
- e. Pengguna air sungai : ... KK

c). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Parangjoro Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 4.920 orang
- Katolik : 62 orang
- Kristen : 140 orang
- Hindu : 2 orang
- Budha : 8 orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : .. orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 8 buah/ 11 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 240 ha
- 2. Padi Ladang : - ha
- 3. Jagung : 2 ha
- 4. Palawija : - ha
- 5. Tembakau : - ha
- 6. Tebu : - ha
- 7. Kakao/ Coklat : - ha
- 8. Sawit : - ha
- 9. Karet : - ha
- 10. Kelapa : - ha

11. Kopi	: -	ha
12. Singkong	: -	ha
13. Lain-lain	: -	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 100	ekor
2. Sapi	: 60	ekor
3. Kerbau	: 3	ekor
3. Ayam	: 106	ekor
4. Itik	:	ekor
5. Burung	: 700	ekor
6. Lain-lain	: .	ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan	: -	ha
2. Tambak udang	: -	ha
3. Lain-lain ;		
Kolam Ikan Lele	: 30 Kolam/ ...	m ²

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 834	orang
2. Buruh Tani	: 1.277	orang
3. Buruh Migrasi	: 110	orang
4. Pegawai Negeri	: 107	orang
5. Pengrajin	: 127	orang
6. Pedagang	: 263	orang
7. Peternak	: 25	orang
8. Bidan Swasta	: 10	orang
9. Pensiunan TNI	: 102	orang
10. Buruh	: 127	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1	orang
2. Sekretaris Desa	: 1	orang
3. Perangkat Desa	: 8	orang
4. BPD	: 9	orang

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	: 1	Lembaga
2. PKK	: 1	Lembaga
3. Posyandu	: 1	Lembaga
4. Pengajian	: -	Kelompok
5. Arisan	: 31	Kelompok
6. Simpan Pinjam	: -	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 6	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok
10. Irma/ Irmus	: -	Kelompok
11. Ormas/ LSM	: -	Kelompok
12. Lain-lain	: -	Kelompok

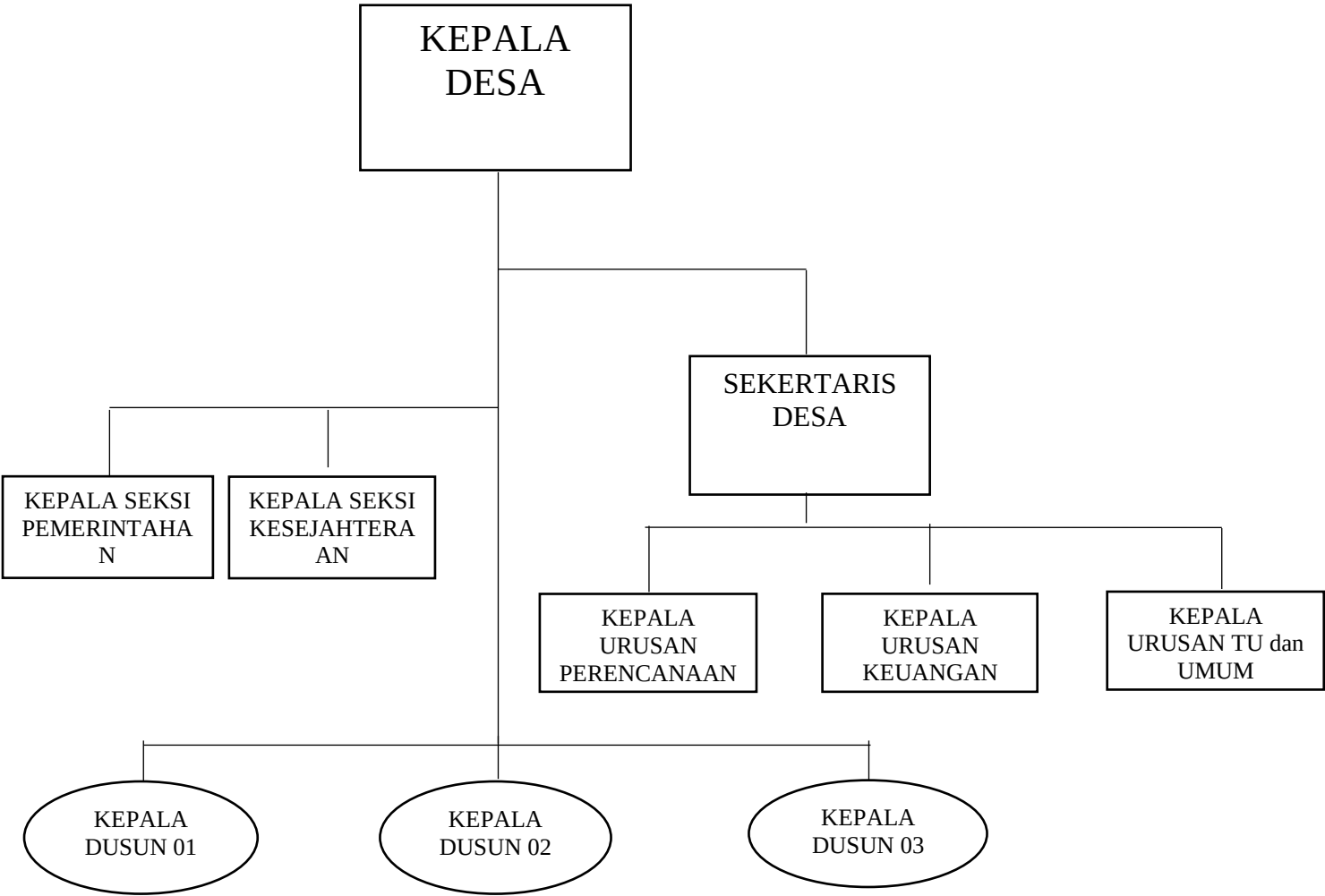
c). Pembagian Wilayah

Nama Dukuh :

1. Dukuh Banjarmasinlati	: Jumlah: 1 RT, 1 RW
2. Dukuh Ngadijoyo	: Jumlah: 2 RT, 1 RW
3. Dukuh Parangjoro	: Jumlah: 6 RT, 2 RW
4. Dukuh Jengkangan	: Jumlah: 2 RT, 1 RW
5. Dukuh Menur	: Jumlah: 6 RT, 2 RW
6. Dukuh GPA	: Jumlah: 1 RT, 1 RW
7. Dukuh Curidan	: Jumlah: 3 RT, 1 RW
8. Dukuh Singkil	: Jumlah: 4 RT, 2 RW
9. Dukuh Jebagan	: Jumlah: 1 RT, 1 RW
10. Dukuh Sudimoro	: Jumlah: 3 RT, 3 RW
11. Dukuh Perum Puri Permata	: Jumlah: 2 RT, 1 RW
12. Dukuh Perum GPA 1	: Jumlah: 1 RT, 1 RW

c). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Daftar Potensi Dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

NO.	POTENSI	MASALAH
	Pembangunan	
1	1. SDMasyarakat 2. lahan	Minimnya kemampuan masyarakat berwirausaha. Kurangnya minat masyarakat beralih profesi lama ke wira usaha
2	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Kurangnya Perawatan dan pemeliharaan Jalan Desa Rusak mengganggu aktivitas warga.
3	1. Murid 2. Guru 3. SDMasyarakat	Kurangnya sarana prasarana PAUD untuk menunjang pendidikan.
4	1. SDMasyarakat 2. Anggaran 3. Lahan	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
5	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Pemakaman Umum tidak terawat.
6	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Kurangnya jalan yang layak untuk penghubung di wilayah Desa
7	1. SDM 2. Gotong royong 3. Anggaran	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
8	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Kurang berfungsinya sistem pengairan sawah/ bendungan tersier
9	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Belum adanya penerangan jalan yang memadai di wilayah desa parangjoro
10	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi

11	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Jembatan penghubung antar desa sempit perlu pelebaran
12	1. Gotong royong 2. Swadaya 3. Anggaran	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
13	1. SDMasyarakat 2. Anggaran 4. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
14	1. Anggaran 2. SDMasyarakat	Kurangnya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
15	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
16	1. Anggaran 2. Gotong royong	Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah smbarangan
17	1. Anggaran, 2. Gotong royong	Akses jalan perekonomian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan rusak
18	1. Swadaya 2. Anggaran	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
19	1. Swadaya 2. Anggaran	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mepet
20	1. SDM 2. Anggaran	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi
21	1. Gotong Royong 2. Anggaran	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
22	1. Lahan 2. Anggaran	Kondisi Pasar Desa dan kios sudah kurang layak.
Pendidikan		
1	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid 5. Anggaran	Terbatasnya dana opersional tenaga pendidik TK dan PAUD
2	1. Murid, 2. Walimurid 3. Guru, 4. Gedung 5. Anggaran	Kurangnya Sarana dan Prasarana TK dan Paud di desa parangjoro

3	1. Murid, 2. Walimurid 3. Guru, 4. Gedung 5. Anggaran	Kurangnya Sarana pendukung kegiatan operasional TPQ
	Kesehatan	
1	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
2	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
3	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa parangjoro
4	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
5	1. Anggaran 2. SDM	Belum terpenuhinya sarana dan pencegahan penyakit endemik
	Pemberdayaan	
1	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih kurangnya modal usaha.
2	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
3	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi,
4	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Kurangnya peran aktif dan kesadaran perempuan dalam pembangunan Desa.
5	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Pemanfaatan Tanah Milik Desa belum maksimal.

	6. Perusahaan	
6	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa 6. Perusahaan	Belum adanya wadah kelembagaan peningkatan perekonomian.

3.2. Daftar Potensi Dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. SDMasyarakat 2. Anggaran	Terjadi genangan air di sebagian wilayah desa parangjoro saat musim hujan.
2	1. Pengusaha 2. Penyuluh 3. Kelompok Usaha	Terkendalanya pemasaran kegiatan ekonomi masyarakat dan kurangnya jaringan dalam mengembangkan usahanya.
3	1. Sarana dan Prasarana Pertanian 2. SDM 3. Lahan 4. Air	Kurang Optimalnya hasil pertanian.
4	1. Lahan 2. Penyuluh 3. SDM	Sumber daya alam yang ada di desa Parangjoro belum bisa dikelola secara maksimal.

3.3. Daftar Potensi Dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat	Kurangnya regenerasi pelaku seni di Desa.
2	1. Pengurus 2. Anggota	Kurang optimalnya fungsi kelembagaan.
3	1. Pengurus 2. Anggota	Kurangnya dana operasional PKK.
4	1. Anggaran 2. Gotong royong 3. Toko Bangunan	Kondisi Balai Desa Parangjoro sebagian bangunan rusak
5	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna kurang optimal dalam bekerja sama dengan Pemdes.
6	1. Gedung 2. Pemdes 3. SDM	Administrasi pemerintah desa belum tertata rapi.
7	1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga	Masih kurangnya masyarakat dalam hal kesadaran hukum.
8	1. Pengurus 2. Pemdes	Kurang optimalnya fungsi LPMD.
9	1. Gedung 2. Swadaya	Kurangnya Fasilitas desa.
10	1. Lembaga Desa 2. Pemdes 3. Anggaran	Kurangnya pemberdayaan BPD.

11	1. Anggaran 2. Swadaya 3. SDM	Kurang berfungsinya fasilitas PKD.
12	1. Gapoktan 2. Kelompok Tani	Kurang optimalnya Program Kerja Gapoktan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Parangjoro ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Parangjoro adalah:

“MELAYANI MASYARAKAT DESA PARANGJORO SECARA MENYELURUH
DEMI
TERWUJUDNYA DESA PARANGJORO YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN
SEJAHTERA

“

4.1.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Parangjoro sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Parangjoro adalah :

1. Meningkatkan ketakwaan serta melestarikan budaya.
2. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai (tupoksi) tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Parangjoro.
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Parangjoro dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Parangjoro dalam berbagai bentuk kegiatan.
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut. Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan ketakwaan serta melestarikan budaya.		
	Tujuan 1: Supaya Masyarakat lebih bertaqwa kepada Tuhan YME dan melestarikan budaya daerah.	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3: Masyarakat Umum

Misi 2: Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai (tupoksi) tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat		
	Tujuan 1: Supaya Perangkat Desa lebih berkualitas dalam pelayanan kepada masyarakat	
		Sasaran 1.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3:
	Tujuan 2: Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Desa	
		Sasaran 2.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 2.2: Perangkat Desa
		Sasaran 2.3: Pemerintah Desa

Misi 3: Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.		
	Tujuan 1: Supaya Pembangunan di desa parangjoro bisa baik ke depannya	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3: Masyarakat Umum
	Tujuan 2: Supaya rasa silaturahmi tetap terjaga di lingkungan desa	
		Sasaran 2.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 2.2: Pemerintah Desa
		Sasaran 2.3: Masyarakat Desa

Misi 4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat		
	Tujuan 1: Menambah Pendapatan Asli Desa	
		Sasaran 1.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3:
	Tujuan 2:	
		Sasaran 2.1: Masyarakat Desa Parangjoro
		Sasaran 2.2: Pemerintah Desa
		Sasaran 2.3:

Misi 5: Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Parangjoro		
	Tujuan 1: Supaya fungsi lembaga lembaga desa bisa lebih baik	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3: Masyarakat Umum
	Tujuan 2: Supaya lebih baik dalam melayani masyarakat	
		Sasaran 2.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 2.2:Perangkat Desa
		Sasaran 2.3: Masyarakat Umum

Misi 6: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		
	Tujuan 1: Menciptakan Lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.	
		Sasaran 1.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3: Wilayah Desa Parangjoro
	Tujuan 2: Memberikan Kehidupan yang Lebih Baik	
		Sasaran 2.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 2.2: Perangkat Desa
		Sasaran 2.3: Pemerintah Desa

Misi 7: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Parangjoro dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Parangjoro dalam berbagai bentuk kegiatan.		
	Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa

		Sasaran 1.3: Masyarakat Umum
	Tujuan 2: Meningkatkan Kemampuan Masyarakat	
		Sasaran 2.1: Masyarakat Umum
		Sasaran 2.2: Pemerintah Desa
		Sasaran 2.3:

Misi 8: Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.		
	Tujuan 1: Supaya masyarakat lebih percaya kepada pemerintah desa	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 1.3: Masyarakat Umum
	Tujuan 2 : Supaya pembangunan lebih tepat sasaran	
		Sasaran 1.1: Pemerintah Desa
		Sasaran 1.2: Perangkat Desa
		Sasaran 2.3:

4.2 Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari , Dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan lain lain yang sah yang dimasukkan dalam APBDes.

- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan Desa dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar; dan
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran dan pendapatan desa yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Parangjoro adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Parangjoro adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Parangjoro adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM,

Gapoktan, Kelompok tani, Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, Jamaah tahlil dan kelompok lainnya.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Parangjoro adalah adanya Lahan-lahan Pertanian, Lahan Strategis, maupun Peralatan Kerja seperti Perindustrian Rumah Tangga.

Desa Parangjoro Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan.
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.

b). Bidang Ekonomi

1. Kurangnya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa.
2. Belum optimalnya pemasukan dana secara maksimal.
3. Terbatasnya dana untuk modal.
5. Belum optimalnya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan.
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.

d). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT\RW belum dapat berjalan optimal.
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal.
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

f). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang.
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja.
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang.

g). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.

h). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal.
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.

i). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.

j). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik.
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
3. Kekurangan air pada musim kemarau.
4. Kesulitannya petani menangani hama penyakit.
5. Mahal dan Tidak terjangkaunya pupuk dan obat pertanian.

k). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
2. Penegakan hukum yang masih kurang.
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal.
3. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.

m). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat.
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar; dan
16. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Parangjoro dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- b). Menetapkan Desa Parangjoro sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.
- c). Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa:
 1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan.
 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.
- e). Menetapkan prioritas pengembangan desa:
 1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan.
 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM-Des adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa enam tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

DESA : PARANGJORO
KECAMATAN : GROGOL
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN : 2018-2024

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		a.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa parangjoro	72 OB	Pemdes	v	v	v	v	v	v	249.840.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa parangjoro	648 OB	Pemdes	v	v	v	v	v	v	1.347.840.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa parangjoro	720 OB	Pemdes	v	v	v	v	v	v	49.068.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	680.601.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Tunjangan BPD	Desa parangjoro	648 OB	Pemdes	v	v	v	v	v	v	176.400.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	80.124.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa parangjoro	252 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	498.780.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa(Bengkok)	Desa parangjoro	6 Tahun	Pemdes	v	v	v	v	v	v	567.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah Kas Desa)	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes		v	v	v	v	v	50.000.000	PAD	v		
				Tunjangan Hari Raya	Desa parangjoro	60 OB	Pemdes	v	v	v	v	v	v	117.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		b.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa parangjoro	6 Unit	Pemdes	v	v	v	v	v	v	60.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa parangjoro	1 Unit	Pemdes	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa parangjoro	1 Unit	Pemdes		v					600.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

1

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa parangjoro	5 Paket	Pemdes		v	v	v	v	v	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa parangjoro	6 Kali	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
d.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa parangjoro	12 Kali	Pemdes	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa parangjoro	12 Kali	Pemdes	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa parangjoro	7 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	21.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, LKPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	18.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa parangjoro	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa parangjoro	1 Paket	Pemdes						v	30.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Desa parangjoro	9 Orang	Pemdes		v	v	v	v	v	180.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

				Penyelenggaraan Kegiatan lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong,TMMD,Kampung KB,KPMD	Desa Parangjoro	7	Kegiatan	Pemdes	v	v	v	v	v	v	350.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		e.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa parangjoro	20	Unit	Pemdes	v			v			40.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa parangjoro	20	Unit	Pemdes	v	v	v	v	v	v	10.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa parangjoro	2	Kali	Pemdes	v			v			4.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa parangjoro	6	Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	v	42.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa parangjoro	20	Unit	Pemdes			v	v	v	v	10.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
Jumlah Per Bidang 1															5.281.653.000				
No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa parangjoro	6	Paket	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa	v	v	v	v	v	30.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v			
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst)	Desa parangjoro	6	Paket	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa	v	v	v	v	v	9.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v			
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Desa parangjoro	3	Unit	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa			v	v	v	15.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v			
				Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ/TKA/Madrasah non Formal	Desa parangjoro	6	Unit	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa	v	v	v	v	v	3.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v			
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peingkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Desa parangjoro	18	Unit	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa	v	v	v	v	v	54.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v			
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa parangjoro	3	Paket	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa				v	v	v	1.500.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa parangjoro	4	Unit	Memperlancar Kegiatan Pendidikan desa			v	v	v	v	8.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

b	Sub Bidang Kesehatan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa parangjoro	50 Orang	Membantu memperlancar program pendidikan warga miskin	v	v	v	v	v	v	15.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa parangjoro	6 Paket	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa parangjoro	6 Unit	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	120.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa parangjoro	60 Orang	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa parangjoro	6 Paket	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa parangjoro	4 Kali	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa			v	v	v	v	2.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa parangjoro	6 Paket	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	3.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa parangjoro	3 Paket	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa				v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa parangjoro	3 Unit	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa parangjoro	3 Unit	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	15.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Desa parangjoro	6 Paket	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pemeliharaan Fasilitas Kendaraan Mobil Kesehatan Desa	Desa parangjoro	1 Unit	memperlancar kegiatan yang terkait kesehatan desa			v	v	v	v	2.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Desa parangjoro	100 Orang	Memperbaiki gizi bagi anak sekolah	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Betonisasi jalan	Desa parangjoro	66 titik	Memperlancar Transportasi	v	v	v	v	v	v	2.552.250.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa parangjoro	5 titik	Transportasi Menjadi Lancar	v	v	v	v	v	v	1.000.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Aspal Jalan	Desa parangjoro	22 titik	Transportasi Menjadi Lancar	v	v	v	v	v	v	2.835.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pengerasan jalan	Desa parangjoro	11 titik	Transportasi Menjadi Lancar	v	v	v	v	v	v	210.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	gorong gorong	Desa parangjoro	20 titik	Transportasi Menjadi Lancar	v	v	v	v	v	v	90.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa parangjoro	1 unit	Lancarnya Pelayanan		v	v	v	v	v	600.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah	Desa parangjoro	12 unit	Pemakan Petilasan menjadi baikaman,Situs Sejarah		v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa parangjoro	6 paket	Terabarunya data peta wilayah dan Sosial Desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa parangjoro	6 paket	Terencanya tata ruang Desa	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan Sumur Bor Pertanian	Desa parangjoro	3 unit	Terbangunnya Sumur Bor Pertanian		v	v		v		300.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan /Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	Desa parangjoro	56 Titik	Pinggiran jalan menjadi kuat	v	v	v	v	v	v	385.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	Desa parangjoro	25 unit	Membantu Warga Miskin	v	v	v	v	v	v	250.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pemeliharaan Taman/taman Bermaian Anak Milik Desa	Desa parangjoro	5 unit	Terpeliharanya taman bermain milik Desa		v	v	v	v	v	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan ,Bank Sampah)	Desa parangjoro	5 unit	Terjaganya Kebersihan Desa		v	v	v	v	v	25.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa parangjoro	1 paket	Terselenggaranya Penghijauan Desa				v			1.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Desa parangjoro	6 paket	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadadaran tentang LH dan Kehutanan	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa parangjoro	10	Unit	Membantu penerangan jalan					V	V	V	V	15.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V									
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa parangjoro	12	unit	membantu penerangan dan sbg identitas desa	V	V		V	V	V	V	V	2.400.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V									
				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa parangjoro	6	Unit	membantu penerangan dan sbg identitas desa	V	V		V	V	V	V	V	18.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V									
				Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Desa	Desa parangjoro	6	unit	Terpeliharanya Pariwisata Tingkat Desa	V	V		V	V	V	V	V	30.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V								
					Mengoptimalkan Manfaat Tanah Kas Desa	Desa parangjoro	2	Unit	Pengelolaan Tanah kas Desa yang tidka terpakai		V		V					200.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V								
Jumlah Per Bidang 2																								8.874.150.000				
No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan												
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s										
		a.	Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa parangjoro	31	unit	Meningkatkan keamaan lingkungan	V	V	V	V	V	V	15.500.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa parangjoro	282	orang	Meningkatkan keamaan lingkungan	V	V	V	V	V	V	14.100.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa parangjoro	6	paket	Meningkatkan keamaan lingkungan	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa parangjoro	222	orang	Meningkatkan keamaan lingkungan	V	V	V	V	V	V	11.100.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa parangjoro	2	unit	Meningkatkan keamaan lingkungan	V		V		V		2.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialis asi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa parangjoro	282	orang	Meningkatkan keamaan lingkungan	V	V	V	V	V	V	2.820.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
				Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa parangjoro	6	paket	Terselenggarany a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V											
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai wakil Desa tkt Kec/ Kabupaten	Desa parangjoro	6	kali	Terselenggarany a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	V	V	V	V	V	V	1.200.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V												

3	Pembinaan Kemasyarakatan	b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI DLL)	Desa parangjoro	6 kali	Melestarikan Budaya	v	v	v	v	v	v	180.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan ,Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Desa parangjoro	31 unit	Melestarikan Budaya	v	v	v	v	v	v	3.100.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	Desa parangjoro	31 unit	Terpeliharanya sarana Prasarana	v	v	v	v	v	v	31.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai wakil Desa tkt Kcc/Kabupaten	Desa parangjoro	6 kali	Lancarnya Kegiatan	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa parangjoro	50 orang	SDM kepemudaan semakin baik	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa	Desa parangjoro	6 kali	Memperlancar Kegiatan Kepemudaan	v	v	v	v	v	v	18.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pemelihaaran sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Milik Desa	Desa parangjoro	3 unit	sarana dan Prasarana Olah raga menjadi baik		v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan	Desa parangjoro	2 unit	Memperlancar Kegiatan Kepemudaan				v	v		100.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembangunan Gedung Olah Raga	Desa parangjoro	1 unit	Memperlancar Kegiatan Kepemudaan		v	v	v			1.200.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa parangjoro	6 paket	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LP MD	v	v	v	v	v	v	30.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembinaan PKK	Desa parangjoro	6 paket	Terselenggaranya Pembinaan PKK	v	v	v	v	v	v	180.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Parangjoro	50 orang	Terbinananya Lembaga Kemasyarakatan	v	v	v	v	v	v	25.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
				Pembinaan RT/RW	Desa parangjoro	100 orang	Terbinananya RT RW	v	v	v	v	v	v	100.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		
		Jumlah Per Bidang 3														1.948.820.000		
No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan bibit perikanan	Desa parangjoro	3 paket	Meningkatkan perekonomian masyarakat		v		v		v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v		

SubBidang Pertanian dan Pternakan	Peningkatan Produksi Tanaman pangan (alat Produksi/Pengelolaan/Penggilangan)	Desa parangjoro	5	unit	Meningkatkan hasil pertanian petani		V	V	V	V	V	10.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa parangjoro	6	unit	Terpeliharanya saluran Irigasi Tersier/Sederhana	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan	Desa parangjoro	50	orang	Meningkatkan SDM Petani dan Peternak	V	V	V	V	V	V	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pembangunan/ Renovasi Balai Pertemuan Tani	Desa parangjoro	3	unit	Memudahkan pertemuan pertanian			V	V	V	V	60.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pengadaan alat alat pertanian	Desa parangjoro	3	unit	Menunjang Kegiatan Pertanian		V	V	V	V	V	15.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana	Desa parangjoro	6	unit	Terbangunnya Irigasi Tersier	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa parangjoro	6	kali	Peningkatan SDM Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa parangjoro	60	orang	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	60.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa parangjoro	54	orang	Meningkatnya SDM BPD	V	V	V	V	V	V	54.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa parangjoro	6	kali	Meningkatnya SDM Perempuan	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa parangjoro	5	kali	Meningkatnya SDM		V	V	V	V	V	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa parangjoro	5	kali	Meningkatnya SDM		V	V	V	V	V	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa parangjoro	6	orang	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		V	V	V	V	V	3.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		
	Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi	Desa parangjoro	6	paket	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	V		

		d.		Pengadaan Tehnologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Desa Parangjoro	6 unit	Meningkatkan Perekonomian warga	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa parangjoro	1 Paket	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	v	v	v	v	v	v	100.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg diselenggarakan oleh Pemdes)	Desa parangjoro	6 Paket	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		v	v	v	v	v	18.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa /Kios Milik Desa	Desa parangjoro	50 unit	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat			v	v	v	50.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v						
				Pembangunan /Rehap Pasar Desa /Kios Milik Desa	Desa parangjoro	20 unit	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat			v			900.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v						
				Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa parangjoro	6 paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
				Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok usaha ekonomi Produktif	Desa parangjoro	5 Unit	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		v	v	v	v	v	5.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
			Jumlah Per Bidang 4														1.686.000.000				
			No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
				Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Parangjoro	6 kali	Memperlancar pengungsian	v	v	v	v	v	v	30.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa parangjoro	6 kali	Penanggulangan bencana	v	v	v	v	v	v	3.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa parangjoro	6 kali	Penanggulangan bencana	v	v	v	v	v	v	3.000.000	ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, PAD, DII	v					
Jumlah Per Bidang 5														36.000.000							
TOTAL															17.826.623.000						

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd
HARDIMAN